

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik Israel–Palestina pada tahun 2024, dengan menempatkan tindakan diplomatik sebagai fokus utama dalam kerangka teori peran negara. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Indonesia menjalankan peran protektifnya terhadap WNI di zona konflik melalui strategi utama yaitu tindakan diplomatik. Tindakan diplomatik ini meliputi diplomasi bilateral dengan negara-negara ketiga seperti Mesir dan Yordania, diplomasi multilateral dalam forum internasional seperti PBB dan OKI, diplomasi kemanusiaan untuk memastikan distribusi bantuan, serta diplomasi hukum internasional melalui keterlibatan dalam sidang Mahkamah Internasional (ICJ). Tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi konkret dari peran negara dalam melindungi warga negaranya sebagaimana diteorikan oleh K.J. Holsti (1970), bahwa negara adalah aktor utama yang bertanggung jawab dalam sistem internasional, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri.

Kedua, keterbatasan akses diplomatik Indonesia akibat tidak adanya hubungan formal dengan Israel menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan perlindungan. Dalam situasi tersebut, peran negara ketiga seperti Mesir menjadi kunci dalam membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan kemanusiaan. Diplomasi intensif Indonesia, terutama melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kairo, berhasil memfasilitasi evakuasi WNI dari Jalur Gaza dan mengamankan jalur kemanusiaan melalui koordinasi lintas negara.

Ketiga, partisipasi aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral dan advokasi di forum internasional memperkuat posisi negara sebagai pelindung warga negara sekaligus pendukung nilai-nilai kemanusiaan global. Indonesia secara konsisten menyuarakan perlindungan warga sipil Palestina dan menegaskan pentingnya akses kemanusiaan tanpa syarat. Melalui diplomasi ini, Indonesia tidak hanya melindungi WNI secara langsung, tetapi juga membangun citra sebagai negara yang memegang teguh komitmen kemanusiaan.

Keempat, meskipun Indonesia telah berhasil melaksanakan sebagian besar misi perlindungan WNI melalui jalur diplomatik, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar-lembaga, keterbatasan data yang akurat terkait WNI di zona konflik, serta kesiapsiagaan operasional yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, perencanaan darurat yang lebih sistematis, dan penguatan jaringan diplomatik dengan negara ketiga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam kebijakan perlindungan WNI ke depan. Dengan demikian, tindakan

diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di wilayah konflik Israel–Palestina merupakan perwujudan dari peran strategis negara dalam menjaga keselamatan warganya dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi kemanusiaan.

4.2 Saran

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana Pemerintah Indonesia menjalankan perannya dalam melindungi WNI di wilayah konflik Israel–Palestina, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah mengembangkan sistem perlindungan WNI yang lebih responsif dan berbasis pada koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas diplomasi dan penguatan sistem data yang lebih akurat tentang keberadaan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas. Hal ini akan memungkinkan negara untuk melaksanakan perlindungan lebih cepat dan lebih efisien saat situasi darurat terjadi.

Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penting bagi pemerintah untuk mengeksplorasi pemanfaatan platform digital dan media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan koordinasi di kalangan WNI di luar negeri, serta memperluas kapasitas evakuasi dengan mengintegrasikan platform digital yang lebih responsif. Pemanfaatan teknologi ini dapat mempercepat penyebaran informasi dan memperluas jangkauan perlindungan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan

teknologi digital dalam konteks ini harus diimbangi dengan perhatian terhadap potensi risiko disinformasi dan polarisasi narasi yang dapat membahayakan keamanan serta stabilitas hubungan internasional.

Selanjutnya, penelitian lebih lanjut bisa dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran negara dalam perlindungan WNI dapat diperkuat melalui kerjasama internasional dan multilateral, khususnya dengan lembaga-lembaga kemanusiaan dan organisasi internasional. Sebuah model kerjasama yang lebih terstruktur antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan negara ketiga, seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia melalui KBRI Kairo, bisa diadaptasi dalam konflik-konflik internasional lainnya. Di samping itu, penting untuk memperhatikan risiko potensial terkait penggunaan instrumen diplomatik dan evakuasi, seperti penyalahgunaan narasi atau tindakan yang dapat mempengaruhi persepsi internasional terhadap kebijakan Indonesia.

Penting pula bagi kajian berikutnya untuk mempertimbangkan dimensi kebijakan jangka panjang. Tidak cukup hanya membahas evakuasi dalam kondisi darurat, penelitian ke depan bisa mengkaji bagaimana negara membangun sistem kesiapsiagaan sipil di luar negeri, termasuk pelatihan komunitas WNI, penyusunan skenario kontinjensi, dan integrasi diplomasi kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri yang lebih luas. Dalam hal ini, refleksi terhadap batas-batas peran negara juga diperlukan, agar tidak hanya menyoroti keberhasilan negara dalam bertindak, tetapi juga mencermati ruang-ruang yang masih luput dari intervensi negara.